

Konflik Kebahasaan: dari Linguistik ke Etnopolitik

Febriansyah Ignas Pradana

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

ignaspradana@gmail.com

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku atau etnis di dalamnya. Selain keharmonisan budaya yang tercipta, tak pelak percampuran antar etnis di Yogyakarta turut menimbulkan konflik-konflik berpayung etnis. Pendekatan metafora konseptual yang dimiliki oleh linguistik kognitif digunakan untuk menyingkap korpus-korpus kebahasaan yang muncul mengenai konflik etnis di Yogyakarta. Berhubungan erat, teori etnopolitik turut menjadi pisau kaji dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini dibahas mengenai bagaimana (1) linguistik kognitif melihat konflik etnis di Yogyakarta, dan (2) etnopolitik melihat konflik etnis di Yogyakarta, serta (3) pertautan kedua ranah ilmu tersebut. Data utama berupa korpus-korpus kebahasaan yang dituturkan oleh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan konflik-konflik yang terjadi. Data diperoleh dari tuturan langsung responden, juga korpus kebahasaan yang terdapat pada laman media daring. Hasil menunjukkan terciptanya dua ranah sumber dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS. Pembahasan secara diakroni mengenai konflik etnis di Yogyakarta turut menjadi fokus dalam penulisan ini.

Kata kunci: linguistik kognitif, etnopolitik, metafora konseptual, Yogyakarta, etnis.

PENDAHULUAN

Predikat kota budaya dan pelajar yang melekat pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DIY, tentu bukan tanpa alasan. Banyaknya sekolah tinggi, akademi hingga kolese ternama menjadi magnet bagi putra-putri daerah lain untuk menimba ilmu di provinsi yang kini dikepalai oleh Sultan Hamengkubuwono X ini. Masuknya para pengabdian ilmu dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan DIY provinsi yang multikultural dan multietnis. Kemultietnisan di DIY tersebut menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif.

Bercampurnya satu etnis dengan etnis lain mampu memperkaya khazanah pengetahuan antar etnis. Berlawanan dengan dampak positif yang muncul, berbaurnya etnis-etnis tertentu dalam satu daerah juga dapat membawa dampak negatif. Terdapat beberapa ketegangan yang mengatasnamakan suku atau etnis masing-masing. Konflik-konflik yang berkenaan dengan masalah etnis atau kesukuan menjadi kajian pada ranah ilmu etnopolitik. Seperti yang dinyatakan oleh Gurr (2007:131), bahwasanya kajian etnopolitik merupakan teori yang menjelaskan mengenai terjadinya konflik etnis yang disebabkan oleh perbedaan jumlah etnis yang berada dalam satu wilayah atau tempat tinggal.

Selanjutnya, Gurr (2007:131) membagi kelompok etnis menjadi (1) *nationalist people* yang merupakan kelompok mayoritas baik dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, dan

(2) *minority people* yang merupakan kelompok minoritas dalam suatu daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Sebuah konflik dinyatakan tergolong sebagai konflik etnopolitis atau etnonasionalis (istilah yang digunakan Salam, 2013) apabila (1) konflik tersebut terjadi dalam batas wilayah suatu negara, (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pihak yang sedang berkuasa, dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan terus-menerus (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1981).

Pada akhir tahun 2016, terdapat konflik mengenai hak kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia nonpribumi di Yogyakarta. Permasalahan ini bermula ketika salah seorang warga keturunan Tionghoa, Siput Lokasari, yang selanjutnya disebut penggugat, ditolak permintaannya untuk membuat sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya. Tanah yang dimaksud penggugat adalah tanah yang dibeli oleh istrinya di Kulon Progo seluas 1.000 m² sekitar enam bulan lalu dan sampai kini tak bisa diubah menjadi hak milik atas namanya karena -seperti dikutipnya dari pejabat Badan Pertanahan Nasional setempat- "*Istri bapak orang Cina*" (Raditya, <https://tirto.id/susahnya-tionghoa-punya-tanah-di-yogya-bQS1>, diakses 16 Mei 2019).

Penggugat lantas menghubungi pihak Sultan Hamengkubuwono X untuk meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini membatalkan surat instruksi kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 1975 lalu. Selanjutnya, permintaan penggugat yang ditolak oleh pihak berwajib melahirkan reaksi negatif dari Siput selaku penggugat keadilan yang disebutnya sebagai diskriminasi ini.

Reaksi negatif dari penggugat tersebut diungkapkan dalam bentuk verbal. Ungkapan-ungkapan negatif tersebut mewakili pikiran-pikiran penutur terhadap kasus tersebut. Hal tersebut senada dengan Ungerer dan Schmidt (2006: 118) yang menyatakan bahwa bahasa dan metafora tidak hanya berfungsi untuk memperindah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan, tetapi menunjukkan cara berpikir seseorang terhadap hal-hal dalam kehidupannya. Hal ini membuktikan bahwa metafora memiliki peran kognitif. Dalam pandangan ilmu linguistik kognitif, metafora tersebut disebut sebagai metafora konseptual (Arimi, 2015).

Metafora konseptual dirumuskan sebagai sebuah proses kognitif yang memungkinkan seseorang membicarakan sebuah konsep sebagai ranah sasaran yang biasanya bersifat abstrak melalui konsep lain sebagai ranah sumber yang biasanya lebih konkret (Lakoff dan Johnson, 1980). Untuk mengetahui kognisi manusia melalui metafora konseptual, terdapat aspek utama yang harus diperhatikan. 'Pemetaan' merupakan bagian yang esensial dari metafora konseptual karena pemetaan inilah yang mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam ungkapan metaforis tersebut (Kövecses, 2010: 16).

Secara umum, metafora diartikan sebagai salah satu gaya bahasa yang mengandung ‘perbandingan’ atau ‘persamaan’ antara suatu hal dengan hal lain. Kedua hal tersebut dibandingkan secara implisit atau dengan cara menciptakan analog. Temuan dalam linguistik kognitif menunjukkan bahwa metafora itu ada dimana-mana dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam bahasa tapi juga dalam pikiran dan tindakan (Arimi, 2015: 125).

Lakoff dan Johnson (1980: 3) menyatakan bahwa sistem konseptual manusia, baik pada pola berpikir dan bertindak, pada dasarnya bersifat metaforis. Pernyataan ini membuktikan bahwa metafora tidak hanya dilihat sebagai fenomena bahasa biasa yang digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan secara menarik. Lebih dari itu, metafora memiliki hubungan erat dengan kognisi seseorang. Sistem konseptual manusia yang bersifat metaforis ini menjadikan tindakan dan cara berpikirnya juga metaforis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metafora berperan dalam menjembatani manusia dalam memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya dan dapat digunakan untuk mengetahui kognisi manusia (Arimi, 2015). Masih merujuk pada Arimi (2015: 126) yang memberi ilustrasi mengenai konsep ‘baik’. Dalam kalimat “Dia ibu yang ‘baik’ bagi anak-anaknya” dan “Arnis mendapat nilai ‘baik’ dalam pelajaran” memiliki perbedaan tentang konsep ‘baik’ itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa KATA (X) ADALAH KATA (Y) atau KONSEP (X) ADALAH KONSEP (Y).

Pengkajian mengenai linguistik kognitif di Indonesia telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Rahmawati (2015) dan Pradana (2018) memberi perhatian khusus terhadap aspek yang menghubungkan dua konsep dalam pikiran manusia tersebut. Dalam tesisnya yang berjudul “Metafora Konseptual *Language* dalam Bahasa Inggris”, Rahmawati menulis mengenai metafora konseptual dari konsep *language* yang terkandung dalam tuturan-tuturan penutur Bahasa Inggris. Dengan memadukan kerangka linguistik kognitif, metafora konseptual, dan analisis komponensial makna, hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora dapat digunakan sebagai sarana untuk melihat kognisi penutur tentang konsep bahasa melalui tuturan yang diproduksi.

Selanjutnya, Pradana (2018) mengungkapkan cara berpikir penduduk Yogyakarta terhadap Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penulisan tersebut, didapatkan 6 konsep ranah sumber yang terbentuk dari ranah sasaran Sultan Hamengkubuwono X. Terlihat pula model kognitif yang diidealkan penduduk Yogyakarta terhadap Sultan Hamengkubuwono X.

Dari ranah etnopolitik, Ilyas (2014) melakukan penelitian mengenai penyelesaian konflik antar desa berbasis pada kearifan lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa

wawancara mendalam dan dokumentasi tersebut, Ilyas mengungkap akar konflik antar desa yang selama ini terjadi dan mengidentifikasi kearifan lokal di Kabupaten Sigi yang dapat dijadikan sebagai media resolusi konflik serta upaya membangun harmoni sosial masyarakat. Dalam penelitian tersebut hasil menunjukkan bahwa dalam konflik antar desa kebanyakan dipicu oleh permasalahan yang sepele yang bersifat personal lalu berubah menjadi lebih komunal dengan menonjolkan identitas pembeda berdasarkan batas wilayah sehingga berubah menjadi konflik antar desa.

Dari tiga penulisan sebelumnya, penulis menemukan beberapa persamaan kajian yang menunjang penulisan ini. Persamaan tersebut antara lain pendekatan dan metode yang dilakukan dan penggunaan korpus-korpus kebahasaan yang muncul dari responden. Korpus-korpus kebahasaan yang mampu mewakili pikiran-pikiran pihak yang terlibat dalam kasus ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tuturan dan pikiran penuturnya. Dalam upaya mengumpulkan korpus-korpus kebahasaan, turut diungkapkan pula kasus-kasus lain yang berkaitan dengan konflik etnis dalam hal kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia non pribumi di Yogyakarta ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini berfokus pada (1) bagaimana konflik etnis tersebut dipandang dari segi linguistik kognitif, dan (2) bagaimana konflik etnis tersebut dipandang dari segi etnopolitik.

METODE PENELITIAN

Data dalam penulisan ini adalah korpus-korpus kebahasaan yang muncul dari pikiran penutur, baik yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik-konflik yang mengatasnamakan etnis di Yogyakarta. Dalam upaya mengumpulkan data, penulis melakukan observasi media dan wawancara langsung. Pada penulisan berjenis kualitatif ini, data dikumpulkan dari media daring dan tuturan langsung dari narasumber yang terlibat dalam konflik etnis di Yogyakarta.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kasus dan nomor data. Terdapat 2 kasus yang dianalisis oleh penulis. Pada kasus pertama adalah kasus yang melibatkan Siput Lokasari sebagai penggugat, yang pada bab hasil pembahasan disebut dengan K1D1-K1D5. Selanjutnya pada kasus kedua adalah kasus yang melibatkan Handoko seorang pengacara keturunan Tionghoa yang mengajukan banding pada 2018 lalu (Yuwono, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all>, diakses pada 16 Mei 2019). Kasus kedua selanjutnya pada bab hasil dan pembahasan disebut dengan K2D1-K2D9.

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan teori metafora konseptual untuk menemukan ranah pertautan antara ranah sumber dan ranah sasaran serta

teori etnopolitik untuk mengetahui kategori, penyebab, dan upaya penyelesaian konflik etnis tersebut. Hasil analisis disajikan dalam bentuk formal dan informal (Sudaryanto, 1993). Penyajian hasil analisis secara formal yaitu penyajian berupa tabel dan diagram serta penyajian secara informal berupa teks-teks biasa.

PEMBAHASAN

Manusia diciptakan dengan pikiran dan dengan pikirannya manusia mampu mengembangkan ide dan konsep dari dalam dirinya. Dengan pikirannya manusia dapat mengatur pengetahuan yang didapat dari pengalaman hidup melalui proses metaforis. Hampir setiap kata yang diucapkan manusia untuk berkomunikasi kepada sesamanya adalah metafora. Metafora dan konsep pikiran manusia saling berkaitan sehingga membentuk metafora konseptual. Arimi (2015: 126) menyatakan bahwa metafora konseptual menempatkan diri dalam satu ranah sumber dan dalam satu ranah sasaran di pihak lain. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa KATA (X) ADALAH KATA (Y) atau KONSEP (X) ADALAH KONSEP (Y). (X) merupakan ranah sasaran yang ingin dipahami dan (Y) adalah ranah sumber sebagai ranah untuk memahami (Arimi, 2015: 127). Dari dua konsep yang saling menggambarkan satu sama lain tersebut terciptalah sebuah pertautan yang disebut *conceptual blending*. Pada penulisan ini diperoleh 5 metafora konseptual dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS. Berikut tabulasi dari 5 metafora konseptual tersebut.

o.	Ranah Target	Ranah Sumber
	KONFLIK ETNIS	DISKRIMINASI RAS
	KONFLIK ETNIS	DISKRIMINASI POSITIF
	KONFLIK ETNIS	TIDAK ADIL
	KONFLIK ETNIS	KEJAHATAN
	KONFLIK ETNIS	INTOLERANSI

Tabel 1: Pemetaan Ranah Target dan Ranah Sumber

Sumber: Data dari K1D1-K2D9

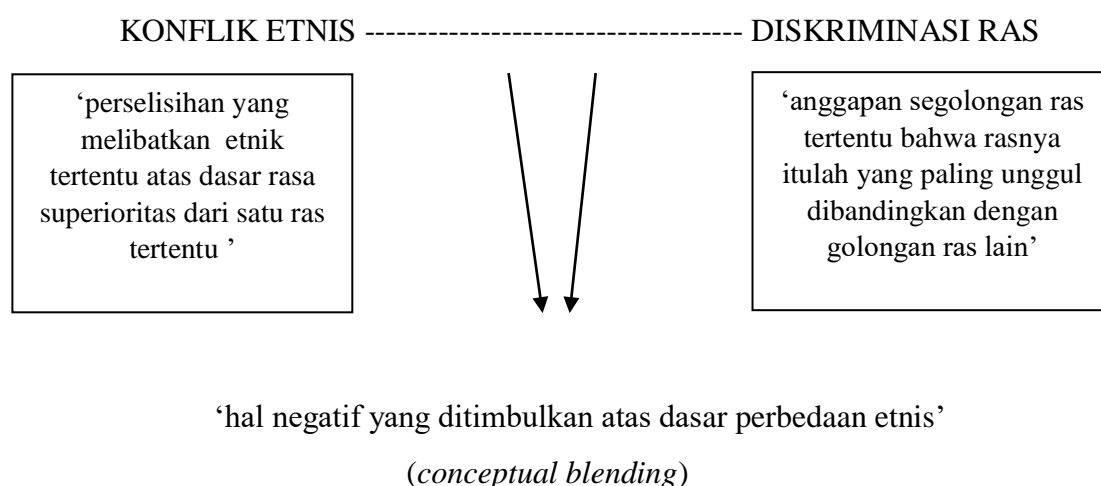
Metafora Konseptual KONFLIK ETNIS ADALAH DISKRIMINASI RAS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya) (KBBI, 2015). Selanjutnya, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik;

rumpun bangsa (KBBI, 2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) turut menjelaskan arti harfiah dari ‘diskriminasi ras’ yaitu anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; rasisme (KBBI, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki konsep dalam pikirannya bahwa KONFLIK ETNIS adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasar pada ciri-ciri fisik dikarenakan salah satu ras menganggap rasnya adalah superior. Hal tersebut dibuktikan dengan korpus kebahasaan yang muncul dan diagram *conceptual blending* di bawah.

(1) "Negara saya tak lagi mengenal adanya warga negara pribumi dan nonpribumi. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Kenapa kami masih dianggap di sini (Yogyakarta) sebagai nonpribumi. Saya ingin gubernur taat kepada perundangan... Saya ingin peraturan perundangan di tempat saya lahir ini ditegakkan oleh siapapun, jangan ada yang memalukan misalnya **diskriminasi ras** ini" (K1D1)

Dari korpus data (1) di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pikiran yang tercipta dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS yaitu DISKRIMINASI RAS. Berikut diagram *conceptual blending* untuk memperkuat penjelasan ranah tersebut.



Gambar 1: Diagram Conceptual Blending

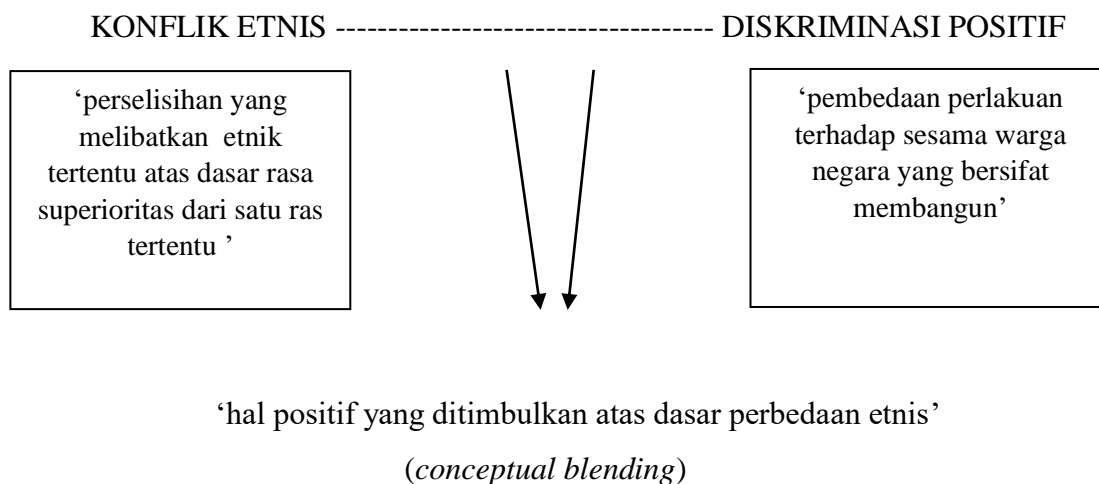
Metafora Konseptual KONFLIK ETNIS ADALAH DISKRIMINASI POSITIF

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya) (KBBI, 2015). Selanjutnya, positif adalah bersifat nyata dan membangun (KBBI, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki konsep dalam pikirannya bahwa KONFLIK ETNIS adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama

warga negara yang bersifat membangun. Hal tersebut dibuktikan dengan korpus kebahasaan yang muncul dan diagram *conceptual blending* di bawah.

(2) "Sampai kapan? Sampai ketimpangan itu tipis, saat ini ketimpangan tinggi. Menyetarakan bukan berarti menyamakan, tetapi ketimpangannya tidak tinggi. Saya menilai, pada saat ini, ketimpangan antara kaya dan miskin di Yogyakarta masih sangat tinggi. Maksudnya **diskriminasi positif**. Diskriminasi itu enggak baik, tetapi jika maksudnya baik itu boleh. Untuk menghapuskan akibat dari diskriminasi yang sudah ada. Misalnya, kalau seorang anak dilarang menonton TV melanggar hak asasi atau tidak. Tetapi, larangan ini tujuannya baik. Oleh karena itu, peraturan tersebut masih perlu diperlakukan di Yogyakarta sampai benar-benar makmur. Untuk dicabut atau diberlakukan perlu hati-hati. Dicabut dampaknya juga ada, diberlakukan nanti ribut terus" (K2D3)

Dari korpus data (2) di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pikiran yang tercipta dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS yaitu DISKRIMINASI POSITIF. Berikut diagram *conceptual blending* untuk memperkuat penjelasan ranah tersebut.



Gambar 2: Diagram *Conceptual Blending*

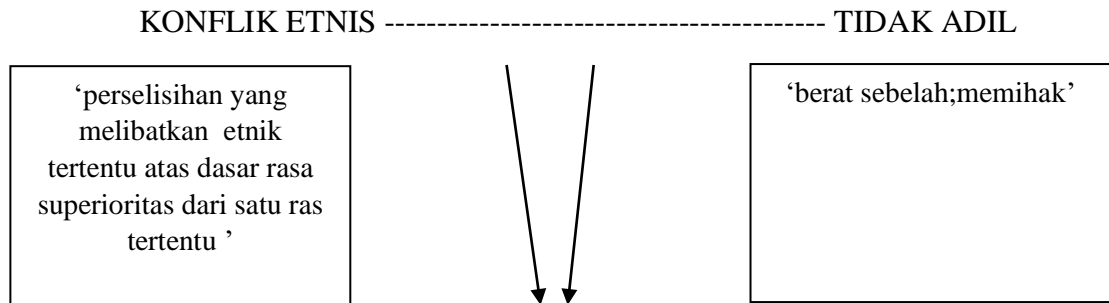
Metafora Konseptual KONFLIK ETNIS ADALAH TIDAK ADIL

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak adil terdiri dari dua kata yaitu ;tidak; dan ;adil; yang berarti berat sebelah; memihak (KBBI, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki konsep dalam pikirannya bahwa KONFLIK ETNIS adalah sebuah keadaan yang berat sebelah dan memihak. Hal tersebut dibuktikan dengan korpus kebahasaan yang muncul dan diagram *conceptual blending* di bawah.

(3) "Ya, problemnya Yogyakarta memang begitu. Kalau dibilang **tidak adil** ya **tidak adil**, kalau dibilang diskriminasi ya diskriminasi. Aturan mainnya memang

keturunan Tionghoa tidak memiliki tanah hak milik. Paling banter hak guna bangunan," (K2D4)

Dari korpus data (3) di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pikiran yang tercipta dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS yaitu TIDAK ADIL. Berikut diagram *conceptual blending* untuk memperkuat penjelasan ranah tersebut.



'perselisihan yang timbul dari keadaan yang berat sebelah/memihak pada suatu etnis'
(*conceptual blending*)

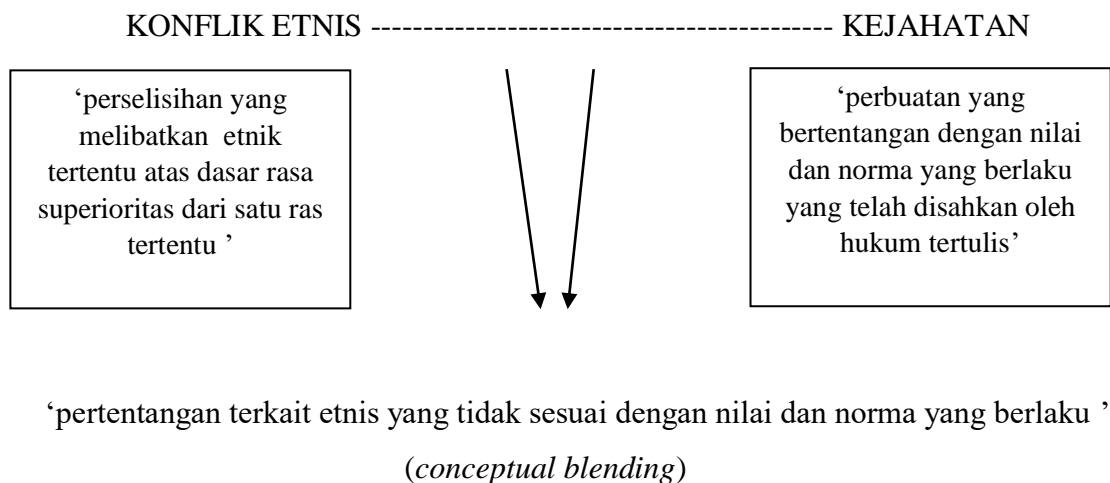
Gambar 3: Diagram *Conceptual Blending*

Metafora Konseptual KONFLIK ETNIS ADALAH KEJAHATAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perbuatan atau sifat yang jahat;perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (KBBI, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki konsep dalam pikirannya bahwa KONFLIK ETNIS adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Hal tersebut dibuktikan dengan korpus kebahasaan yang muncul dan diagram *conceptual blending* di bawah.

(4) "Di Jakarta, Gubernur digugat dan bisa masuk penjara. Di sini sepertinya berat sekali. Kalau kita tahu **kejahatan**, tapi diam saja, siapa yang mau berjuang?" (K2D5)

Dari korpus data (4) di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pikiran yang tercipta dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS yaitu KEJAHATAN. Berikut diagram *conceptual blending* untuk memperkuat penjelasan ranah tersebut.



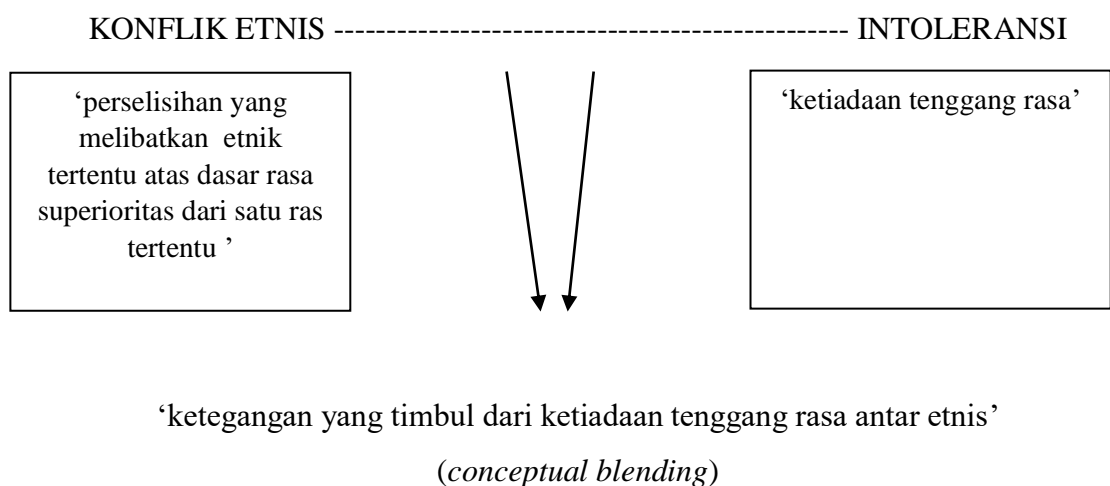
Gambar 4: Diagram *Conceptual Blending*

Metafora Konseptual KONFLIK ETNIS ADALAH INTOLERANSI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa (KBBI, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki konsep dalam pikirannya bahwa KONFLIK ETNIS adalah ketegangan yang timbul dari ketiadaan tenggang rasa antar etnis. Hal tersebut dibuktikan dengan korpus kebahasaan yang muncul dan diagram *conceptual blending* di bawah.

(5) "Kami berpisah sementara. Melihat **intoleransi** ini, dia malas tinggal di Jogja bersama saya. Tidak apa-apa," (K2D9)

Dari korpus data (5) di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pikiran yang tercipta dari ranah sasaran KONFLIK ETNIS yaitu INTOLERANSI. Berikut diagram *conceptual blending* untuk memperkuat penjelasan ranah tersebut.



Gambar 5: Diagram *Conceptual Blending*

Selanjutnya, ditilik dari ranah etnopolitik, kasus larangan kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia nonpribumi di Yogyakarta ini tergolong sebagai konflik etnis. Kasus etnis ini didukung dengan teori konflik dan diskriminasi (Brown, 1997). Teori etnopolitik merupakan teori yang menjelaskan mengenai terjadinya konflik etnis yang disebabkan oleh perbedaan jumlah etnis yang berada dalam satu wilayah atau tempat tinggal. Dalam kasus ini *nasionalist people* adalah etnis Jawa dan pribumi lain dan *minority people* adalah etnis Tionghoa, beserta etnis nonpribumi lain termasuk Arab, India, dan sebagainya. Menurut Suryo dalam <https://www.voaindonesia.com>, kasus ini berawal dari jaman penjajahan Belanda di mana para pedagang Cina dianggap lebih dekat dengan penguasa sehingga saat terjadi perlawanan rakyat, kelompok Tionghoa yang mayoritas pedagang turut dimusuhi dan juga tidak diperbolehkan memiliki tanah di kawasan pedesaan.

Pada teori konflik, kasus ini memiliki dua faktor, yaitu faktor utama dan pemicu (Brown, 1997). Pada faktor utama adalah dirumuskannya Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 898/I/A/1975 berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Pada faktor pemicu adalah pendapat etnis Tionghoa bahwa Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 898/I/A/1975 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU No.5 Tahun 1960, UU 39 Tahun 1999, dan UU 40 Tahun 2008 (Sucahyo, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 17 Mei 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari ranah linguistik kognitif dan etnopolitik berhasil disimpulkan bahwa konflik etnis yang terjadi di Yogyakarta menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan positif dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pandangan yang berbeda tersebut berasal dari dua etnis berbeda yang menjadi fokus dari konflik ini. Konflik etnis yang terjadi di Yogyakarta ini, pun didasari atas kesenjangan dan sikap diskriminatif yang terdapat antara etnis Jawa dan pribumi lain selaku *nationalist people*, dan etnis Tionghoa, juga nonpribumi lain sebagai *minority people*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Sailal. 2015. *Linguistik Kognitif: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: A.com Press.
- Brown, E , Michael. 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict*. United States: MIT Press.
- Dougherty, James dan Pfaltzgraff, Robert L. 1981. *Contending Theories of International Relations*. US: Lippincott.
- Gurr, Ted, Robert. 2007. *Minorities, Nationalist, And Islamists, Managing Communal Conflict dalam Chester A. Crocker, et al. The Twenty-First Century, Leashing The Dogs Of War, Conflict Management In A Divided World*. Washington, D.C.: United States Institute Of Peace Press.
- Kövecses, Zoltan. 2010. *Metaphor: A Practical Introduction*. UK: Oxford University Press.

- Lakoff, George & Johnson, Mark. 1980. *Metaphors We Live by*. USA: University of Chicago Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ungerer, Friedrich & Schmid, Hans-Jörg. 2006. *An Introduction to Cognitive Linguistics*. London: Longman.
- Raditya, <https://tirto.id/susahnya-tionghoa-punya-tanah-di-yogya-bQS1>, diakses 16 Mei 2019.
- Sucahyo, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 17 Mei 2019.
- Yuwono, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all>, diakses pada 16 Mei 2019.